

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Pada bab ini, peneliti akan membahas kajian Pustaka yang berisi kajian Pustaka, kerangka pemikiran, dan Hipotesis. Kajian Pustaka berisi mengenai sumber dan landasan dasar teori mengenai hal-hal yang telah diteliti sebelumnya dan dapat dijadikan landasan teori mengenai Sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, dan kualitas laporan keuangan. Menurut Moh. Toharudin (2021:40), terdapat pengertian mengenai kajian pustaka, yakni sebagai berikut:

“Kajian Pustaka adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk melakukan kajian secara sungguh-sungguh tentang teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti sebagai dasar dalam melangkah pada tahap penelitian selanjutnya.”

2.1.1 Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal adalah hal yang wajib dimiliki oleh perusahaan karena berbagai alasan. Baik demi kelancaran operasional perusahaan hingga tingkat keamanan. Aktivitas Pengendalian internal menjadi penting untuk dibahas layaknya aspek aktivitas lain dalam berbisnis, seperti pengadaan, produksi, hingga legalitas.

2.1.1.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Setiap perusahaan harus menggunakan sistem untuk mengatur kegiatan operasional perusahaan. Dengan menggunakan sistem yang baik,

maka perusahaan bisa mencegah kecurangan-kecurangan yang akan terjadi. Salah satu sistem yang baik bagi perusahaan adalah sistem pengendalian internal.

Menurut Mulyadi (2017:129) sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Sementara pengertian sistem pengendalian internal menurut Mahmudi (2016:251) adalah:

“Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.

Menurut Numalia Hasanah dan Achmad Fauzi (2016: 181) Sistem pengendalian internal adalah sebagai berikut:

“Sistem pengendalian intern adalah suatu proses integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (eksekutif) dan jajarannya untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan, pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan peraturan perundang-undangan”

Menurut V. Wiratna Surjaweni (2015:71) dan Numalia Hasanah dan Achmad Fauzi (2016:181) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 bahwa unsur sistem pengendalian internal dalam Peraturan Pemerintah ini mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Internal yang telah dipraktikan dilingkungan pemerintah di berbagai negara dan

komponen Sistem Pengendalian Internal ini pun digunakan sebagai indikator yang meliputi:

- a. Lingkungan Pengendalian.
- b. Penilaian Risiko.
- c. Kegiatan Pengendalian.
- d. Informasi dan Komunikasi.
- e. Pemantauan.

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2013: 221) mengemukakan bahwa:

“Sistem Pengendalian Internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai guna mencapai tujuan-tujuan tertentu”.

Sementara pada Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 menjelaskan sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Adapun unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 mengacu pada unsur

Sistem Pengendalian Internal yang telah di praktikan pada lingkungan pemerintahan di berbagai Negara yang meliputi:

1. Lingkungan Pengendalian

Menurut PP Nomor 60 tahun 2008 Pasal 4 seluruh pimpinan instansi di dalam pemerintah wajib menciptakan suatu lingkungan pengendalian yang memiliki perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika
- b. Komitmen terhadap kompeten
- c. Kepemimpinan yang kondusif
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
- g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif, dan
- h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2. Penilaian Resiko

Menurut PP Nomor 60 tahun 2008 Pasal 13, seluruh pimpinan instansi di dalam pemerintah wajib melakukan penilaian resiko yang ada.

Penilaian resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Identifikasi resiko, dan
- b. Analisis resiko

Dalam rangka penilaian resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan :

- a) Tujuan Instansi Pemerintah, dan
- b) Tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan

3. Kegiatan Pengendalian

Menurut PP Nomor 60 tahun 2008 Pasal 18 ayat 1, seluruh pimpinan instansi di dalam pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas (PP Nomor 60 tahun 2008 Pasal 18 ayat 3):

- a. Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan
- b. Pembinaan sumber daya manusia
- c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
- d. Pengendalian fisik atas aset
- e. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja
- f. Pemisahan fungsi
- g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting
- h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian

- i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya
- j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya
- k. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

4. Informasi dan Komunikasi

Menurut PP Nomor 60 tahun 2008 Pasal 41 dan Pasal 42, seluruh pimpinan instansi di dalam pemerintah wajib melakukan identifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan semua informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang-kurangnya:

- a) Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi, dan
- b) Mengelola mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

5. Pemantauan

Menurut PP Nomor 60 tahun 2008 Pasal 43, Pimpinan Instansi wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui berkelanjutan evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reuiu lainnya.

2.1.1.2 Indikator Sistem Pengendalian Internal

Indikator Pengendalian Internal menurut *Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission (COSO)* (2013:4) menyatakan bahwa:

1. Lingkungan Pengendalian (*control environment*) Lingkungan pengendalian merupakan prosedur yang ada di dalam organisasi atau perusahaan untuk menjalankan struktur pengendalian internal yang baik.
2. Kegiatan Pengendalian (*control activities*) Kegiatan Pengendalian merupakan berbagai proses dan upaya yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk menegakkan pengawasan atau pengendalian operasi perusahaan.
3. Pemahaman Resiko (*risk assesment*) Manajemen perusahaan harus dapat mengidentifikasi berbagai risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Dengan memahami risiko, manajemen dapat mengambil tindakan pencegahan, sehingga perusahaan dapat menghindari kerugian yang besar.
4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*) Informasi dan Komunikasi harus dapat mengetahui bagaimana transaksi diawali hingga proses transaksi yang dilakukan dalam perusahaan sudah berjalan dengan baik dan berhasil.
5. Pemantauan (*Monitoring*) Pemantauan adalah kegiatan untuk mengikuti jalannya sistem informasi akuntansi sehingga apabila ada sesuatu berjalan tidak seperti yang diharapkan, dapat diambil tindakan segera.

2.1.2 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas sangatlah dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang memiliki pemahaman mengenai akuntansi pemerintahan. Sumber Daya Manusia merupakan suatu acuan dalam membuat laporan keuangan yang berkualitas karena seseorang yang menyusun laporan keuangan adalah mereka yang sudah menguasai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

2.1.2.1 Pengertian Kompetensi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah individu-individu dalam organisasi yang memberikan sumbangan berharga pada pencapaian tujuan organisasi (Eddy Soeryanto Soegoto,2014:306). Menurut Herman Sofyandi, (2013:114) sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat dalam organisasi, timbulnya kebutuhan akan profesionalisme untuk membantu organisasi dalam melaksanakan tujuannya menunjukkan semakin berperannya sumber daya manusia dalam mencapai keberhasilan organisasi.

Widodo (2001) dalam Kharis (2010) menjelaskan kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Sumber daya manusia yang kompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik.

Menurut Nurillah (2014) mengemukakan Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah:

“Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.”

Sedangkan menurut Wirawan (2015:18) kompetensi sumber daya manusia adalah sebagai berikut:

“Sumber daya manusia adalah orang yang disebut sebagai manajer, pegawai, karyawan, buruh atau tenaga kerja yang bekerja untuk organisasi”.

Adapun menurut Ardeno Kurniawan (2015:118) mengemukakan bahwa:

“Kompetensi adalah pengetahuan dan keahlian yang diperlukan seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugasnya”.

Menurut Donni Juni Priansa (2018:252) mengemukakan bahwa:

"Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) yang ada didalamnya. Dengan demikian, organisasi tidak hanya berfokus pada kinerja dan produktivitas kerja yang handal melalui pembangunan pegawai berbasis kompetensi."

Menurut Mangkunegara (2012:40) kompetensi sumber daya manusia adalah sebagai berikut:

“Kompetensi sumber daya manusia adalah kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya.”

Dari definisi diatas dapat dikatakan bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia adalah kesesuaian individu dalam organisasi yang memiliki standar untuk

penilaian baik atau buruknya SDM tersebut yang memiliki peran dalam pencapaian organisasi.

2.1.2.2 Indikator Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien (keputusan Kepala BKN No 46 Tahun 2007).

Menurut Spencer dan Spencer (1995) dalam (Sutrisno, 2009, h; 204-205) Indikator dari Kompetensi Sumber Daya Manusia terdiri dari:

a. Pengetahuan

Kesadaran dalam bidang kognitif. Karyawan harus mengetahui cara melakukan identifikasi belajar dan bagaimana melakukan pembelajaran yang baik sesuai dengan kebutuhan yang ada di perusahaan.

b. Keterampilan

Keterampilan adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya

c. Sikap

Perasaan (senang tidak senang, suka tidak suka) atau reaksi terhadap sesuatu yang datang dari luar. Misalnya, krisis ekonomi, kenaikan gaji dll.

2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas Laporan Keuangan merupakan hasil akhir dari proses kegiatan akuntansi yang mampu memberikan suatu informasi Keuangan yang dapat dipahami oleh pemakai dan digunakan untuk pengambilan keputusan di masa yang akan datang.

2.1.3.1 Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Mahmudi (2016:13) menjelaskan bahwa laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Informasi yang disajikan untuk membantu stakeholder dalam membuat keputusan sosial, politik, dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas”.

Ikatan Akuntan Indonesia (2012) dalam Standar Akuntansi Keuangan, menyatakan bahwa setiap laporan keuangan yang disusun merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan yang lengkap. Pelaporan keuangan yang lengkap biasanya terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan catatan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Semua laporan keuangan tersebut merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan atau entitas tertentu dalam suatu periode akuntansi tertentu yang biasanya digunakan untuk menjelaskan dan menggambarkan kinerja sebuah entitas atau perusahaan tersebut.

“Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas

pelaporan” (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010). Dalam sebuah lembaga pemerintah dituntut untuk membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan formal seperti laporan surplus defisit, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan neraca serta kinerja yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan non finansial.

Menurut Rahmadani (2015:6) tujuan umum suatu laporan keuangan khususnya pada laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan sebuah informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja suatu entitas dalam proses pelaporan yang dapat digunakan oleh semua pengguna dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Selanjutnya pengertian Laporan Keuangan menurut Wastam Wahyu Hidayat (2018:2) menyatakan bahwa:

“Laporan Keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dimana informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan suatu perusahaan”.

2.1.3.2 Pengertian Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya, (Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010:245). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat

karakteristik tersebut antara lain relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Menurut Azhar Susanto (2013:14) menjelaskan bahwa laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

“Kualitas laporan Keuangan adalah laporan yang mempunyai keakurasian dan kesesuaian dengan kebutuhan dan kelengkapan dari laporan yang dihasilkan”.

Sedangkan menurut Abdul Hafiz Tanjung (2010:13) menyatakan kualitas laporan Keuangan adalah:

“Kualitas laporan Keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya”.

Ibrahim Inga (2017:163) menjelaskan bahwa kualitas dapat diartikan sebagai ukuran relatif tentang kebaikan. Menurut Wastam Wahyu Hidayat (2018:2) laporan keuangan merupakan suatu kondisi yang menggambarkan informasi keuangan suatu perusahaan, dimana informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan suatu perusahaan tersebut.

Berdasarkan Pengertian Kualitas laporan Keuangan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan Keuangan adalah informasi mengenai kondisi Keuangan perusahaan, dan menjadikan informasi tersebut sebagai gambaran kinerja Keuangan suatu perusahaan.

2.1.3.3 Indikator Kualitas Laporan Keuangan

Karakteristik Laporan Keuangan Wastam Wahyu Hidayat (2018:5) yaitu:

1. Informasi itu harus bermanfaat dan dipahami.
2. Informasi harus relevan dengan pengambilan keputusan.
3. Informasi yang disajikan harus handal dan dapat dipercaya.
4. Informasi harus memiliki sifat daya banding.

Sementara karakteristik kualitas laporan Keuangan menurut Hery (2015:8) sebagai berikut:

1. Dapat Dipahami

Agar bermanfaat, dalam penyajiannya laporan keuangan harus disajikan dengan cara yang dapat dipahami oleh penggunanya sehingga pengguna laporan keuangan tersebut dapat mengerti informasi apa yang disampaikan di dalamnya dan dapat menginterpretasikannya.

2. Relevan

Agar bermanfaat, penyajian laporan keuangan harus dapat mempengaruhi keputusan penggunanya, dengan cara membantu penggunanya untuk mengevaluasi peristiwa dimasa lalu, masa kini ataupun peristiwa yang akan terjadi dimasa yang akan datang.

3. Keandalan

Agar laporan keuangan dapat bermanfaat, informasi yang disajikan juga harus handal. Informasi yang disajikan harus disajikan dengan sebenar-benarnya dan

terbebas dari kesalahan, informasi yang menyesatkan, kesalahan material, serta dapat diandalkan kebenarannya oleh pengguna informasi tersebut.

4. Dapat Dibandingkan

Dalam penyajiannya, laporan keuangan harus dapat diperbandingkan dengan laporan keuangan yang telah disajikan dari sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan yang terdapat pada entitas lainnya. Ada dua cara untuk membandingkan laporan keuangan tersebut, pertama secara internal dimana entitas tersebut menerapkan kebijakan akuntansi yang sama setiap tahunnya, yang kedua secara eksternal dimana laporan keuangan dibandingkan dengan entitas lain yang memiliki kebijakan akuntansi yang sama dengan entitasnya.

1. Konsistensi

Dalam penyajian laporan keuangan, metode atau prinsip yang digunakan oleh suatu entitas harus sama dari periode ke periode selanjutnya dan tidak diperbolehkan berubah ubah. Dengan kata lain suatu entitas tidak diperbolehkan menggunakan satu metode di periode ini dan menggunakan metode yang berbeda di periode selanjutnya. Dalam penyajian laporan keuangan ini diharapkan dapat menjaga konsistensinya agar laporan keuangan yang disajikan dapat tetap akurat.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka indikator kualitas laporan Keuangan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah dapat dipahami, relevan, andal serta dapat dipercaya, dapat dibandingkan, dan konsistensi.

Sementara menurut Azhar Susanto (2017:13) kualitas laporan keuangan didapat diperluas menjadi:

1. Efektifitas, berkaitan dengan relevansi suatu informasi dalam mendukung suatu proses bisnis, termasuk didalamnya harus disajikan dalam waktu yang tepat, akurat, konsisten, dapat digunakan dan lengkap.
2. Integritas, berkaitan dengan akurasi dan kelengkapan informasi juga validitasnya berdasarkan aturan-aturan yang berlaku.
3. Kepatuhan, berkaitan dengan kepatuhan terhadap undang-undang, peraturan, serta tanggung jawab pihak eksternal.
4. Kebenaran informasi, berkaitan dengan sistem informasi yang menyajikan informasi yang cocok digunakan untuk mengoperasikan dan memberikan pemakai laporan keuangan yang diperlukan oleh pemakai dan badan pemerintah

Berdasarkan teori-teori diatas mengenai indikator kualitas laporan Keuangan yang berisi informasi yang menjamin kualitas laporan Keuangan tersebut. Maka dari uraian tersebut, indikator yang digunakan dalam informasi laporan Keuangan yang berkualitas adalah laporan Keuangan yang berkualitas adalah laporan Keuangan yang dapat dipahami, relevan, andal dan dapat dipercaya, berdaya banding, konsisten, efektif, dan tepat waktu.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran menunjukkan pengaruh antar variabel Independen dengan variabel dependen dan pengaruhnya antara variabel independen serta dependen terhadap variabel intervenimng Variabel independen dalam penelitian ini adalah Sistem Pengendalian Internal (X1), Kualitas Sumber Daya Manusia (X2), dan variabel dependen yaitu Kualitas Laporan Keuangan Perusahaan (Y).

2.2.1 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Sistem pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengawasi kinerja sumber daya manusia suatu organisasi serta sangat berperan penting dalam pencegahan dan mendeteksi adanya kecurangan (*fraud*). Permendagri No. 59 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan sebuah proses yang dirancang untuk memberikan suatu keyakinan yang mencukupi dengan sebuah pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dan keterandalan laporan keuangan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan.

Pengendalian internal memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian tujuan suatu organisasi baik organisasi bisnis maupun sektor publik seperti organisasi pemerintah. Rahmadani (2015) menyatakan bahwa

variabel pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah Kabupaten Pasaman Barat. Semakin baiknya pengendalian internal maka akan semakin baik juga kualitas laporan keuangan daerah yang dihasilkan.

Di dukung dengan penelitian yang di lakukan oleh peneliti terdahulu menyatakan bahwa keterkaitan antara pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan adalah sebagai berikut (Rokhlinasari & Hidayat, 2016) :

“Organisasi harus menetapkan pengendalian intern sesuai dengan PP 80 Tahun 2005 karena pengendalian intern yang diterapkan dalam organisasi kurang baik akan sangat berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah.”

Keterkaitan selanjutnya antara pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan adalah sebagai berikut (Modo et al., 2016):

“Membuktikan bahwa pengendalian berpengaruh dapat meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan. Meningkatnya kualitas informasi laporan keuangan apabila pengawasan intern yang diterapkan organisasi telah dilaksanakan dengan baik sehingga dapat mewujudkan tercapainya tujuan organisasi dalam menghasilkan laporan keuangan dengan kualitas yang baik.”

Menurut Anastasia dan Lilis Setiawati (2011:70) sistem pengendalian internal sebagai proses yang diimplementasikan oleh dewan direksi, manajemen, serta seluruh staff dan karyawan di bawah arahan mereka dengan tujuan untuk memberikan jaminan yang memadai atas tujuan pengendalian yaitu realibilitas laporan keuangan. Sedangkan menurut Hery (2014:202) Sistem Pengendalian Internal atas Laporan

Keuangan didefinisikan sebagai sebuah proses untuk memberikan jaminan yang memadai mengenai reliabilitas laporan keuangan.

Menurut Sri Rhoklinasari dan Adi Hidayat (2016) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Begitu pula menurut Emy Dwi Trisnani, Moh. Dimiyati, dan Hadi Paramu (2017) dalam jurnalnya menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Kemudian dalam penelitian yang dilakukan oleh Suryani (2018) juga menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan

2.2.2 Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hubungan kompetensi sumber daya manusia dengan kualitas laporan keuangan daerah menurut Wahyono (2004:12) adalah dalam menghasilkan suatu nilai informasi yang bernilai (keterandalan) di sini menyangkut dua elemen pokok yaitu, informasi yang dihasilkan dan sumber daya menghasilkannya. Menyangkut informasi laporan keuangan tersebut harus dibuat sedemikian rupa sehingga laporan keuangan yang dihasilkan mempunyai kemampuan dalam informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid.

Kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*output*) dan hasil-hasil (*outcome*). Sumber daya manusia diukur berdasarkan latar belakang pendidikan yang diperoleh pegawai.

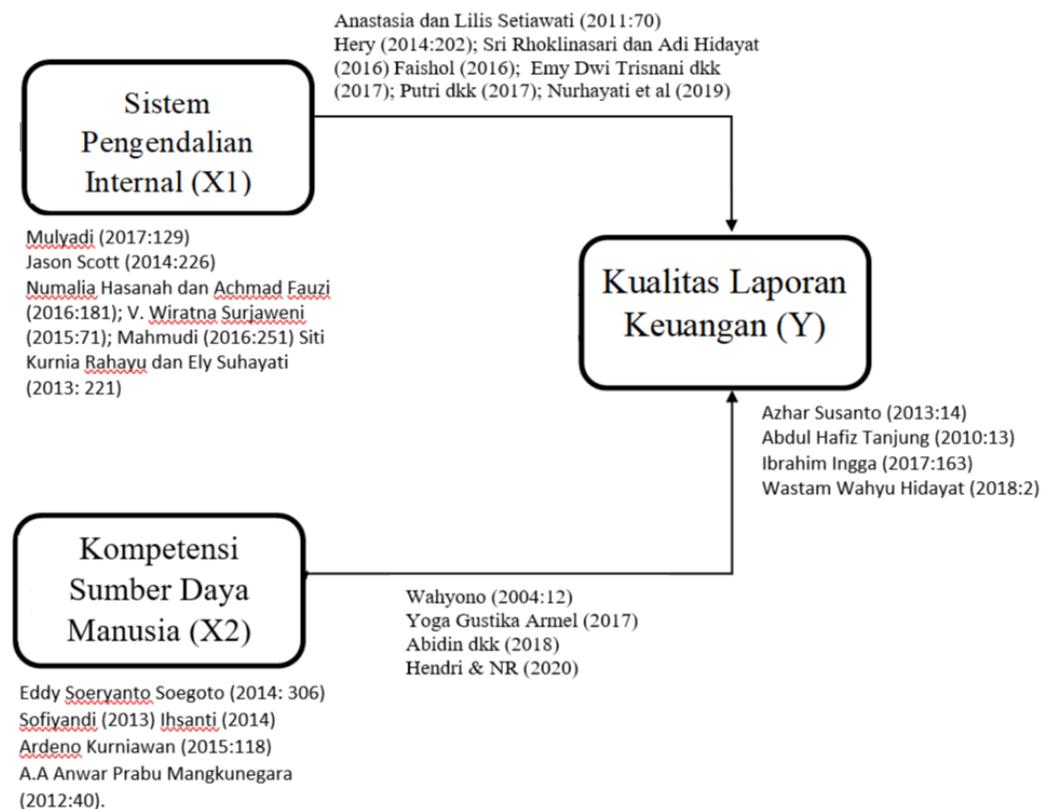
Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Yoga Gustika Armel (2017) yang mampu membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan jika diterapkan standar akuntansi yang baik.

Dari hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan pada kualitas laporan keuangan (Trisnawati & Wiratmaja, 2018). Artinya semakin baik kualitas sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh suatu organisasi, maka akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan, dan sebaliknya. Penelitian serupa yang menyatakan pengaruh secara parsial sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan telah dilakukan oleh (Faishol, 2016), (Nurhayati et al., 2019), dan (Putri dkk, 2017). Sedangkan penelitian yang menyatakan pengaruh secara parsial kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif

signifikan terhadap kualitas laporan keuangan telah dilakukan oleh (Abidin dkk., 2018) dan (Hendri & NR, 2020).

2.2.3 Bagan Kerangka Pemikiran

Berdasarkan telaah pustaka diatas, maka paradigma yang melandasi penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Karena sifatnya masih sementara, maka perlu dibuktikan kebenarannya melalui data empirik yang terkumpul (Sugiyono, 2017:99)

Berdasarkan dari kerangka pemikiran di atas, maka peneliti mengambil keputusan sementara (hipotesis) sebagai berikut:

H₁: Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

H₂: Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan